

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Alumni, Bandung.*
- Harsono, Boedi, 2002, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesembilan, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2011, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan Kedelapan, Kanisius, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mustofa, 2010, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta Tanah*, Karyamedia, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P, 1989, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1999, *Pendaftaran Tanah Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Peranginangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sayekti, Sri, 2000, *Hukum Agraria Nasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Sumardjono, Maria S.W, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*, Kompas, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia*, UII Press, Jakarta.

Wibawanti, Erna Sri dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah & Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006

C. Jurnal/Makalah/Tesis/Desertasi

A. Hamid S. Attamimi, 1990, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Suatu Studi Analisa Mengenai Utusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV". *Disertasi* Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Caecilia Dewi Purwitasari, 2011. "Penandatanganan Akta PPAT yang dilakukan di luar Daerah Kerja PPAT di Sleman". Yogyakarta : *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

Helga Evelina, 2014. "Aspek Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang Dilakukan Oleh Camat di dalam Wilayah Kerjanya". Yogyakarta : *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

Umelva, 2013. “Akibat Hukum dari Akta Jual-Beli Tanah yang Dibacakan PPAT yang Berada di Luar Wilayah Kerjanya Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1998 (Studi Kasus PPAT X di Depok)”. Yogyakarta : *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

Sri Winarsih, Maret 2002. “Pengaturan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum”. Jakarta : Majalah YURIDIKA, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 17 Nomor 2.

D. Internet

www.kamuskbbi.web.id, diakses pada tanggal 24 Agustus 2016.

www.setkab.go.id, diakses pada tanggal 27 Agustus 2016